

## ISLAM DAN PEMBAURAN SOSIAL: REKONSTRUKSI FENOMENA MULTIKULTURALISME

Aqil Irham

Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung  
e-mail: irham.aqil@yahoo.com

Diterima: 16 November 2015

Direvisi: 19 November 2015

Diterbitkan: 15 Desember 2015

### Abstract

*Islam, as religion which has a universal concept, views that assimilation is inherent (traits) which stands in every individu, thus, in the next stage also dwells in every human group as the group of individuals themselves. The relationship between Islam and assimilation is absolute; it can be seen in al Hujurat: 13 which mean that the necessity for human to socialize or assimilate. In addition, the meaning of the verse is the design of God about pluralism in the present context and review by using the term of multiculturalism. Assimilation requires the interrelatedness of understanding and mutual respect of differences as a thing that must be upheld, because only with mutual respect the assimilation will be carried out responsibly and dignity. In contrary, without promoting respect for differences in attitude, the assimilation could certainly have a lot of problems; even tends to face competition wrapped by hyphocretism.*

**Keywords:** Islam, Social Assimilation, Multiculturalism

### Abstrak

Sebagai agama yang memiliki konsep universal, Islam berpandangan bahwa pembauran merupakan sesuatu yang inheren (sifat bawaan) yang ada pada setiap individu manusia, sehingga pada tahapan selanjutnya juga bersemayan pada setiap kelompok manusia yang merupakan kumpulan dari individu-individu itu sendiri. Hubungan antara Islam dan pembauran merupakan sesuatu yang mutlak, hal ini bisa dilihat dalam surat al Hujurat :13 yang bermakna keharusan bagi manusia untuk bersosialisasi atau melakukan pembauran. Selain itu, makna dari ayat tersebut adalah adanya design Allah tentang pluralisme yang dalam konteks kekinian di kaji dengan menggunakan term multikulturalisme. Pembauran menuntut adanya kesaling pemahaman dan saling menghargai adanya perbedaan sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi, sebab hanya dengan adanya sikap saling menghargai tersebut, pembauran akan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bermartabat. Sebaliknya, tanpa mengedepankan sikap penghargaan terhadap perbedaan, maka pembauran bisa dipastikan akan banyak mengalami kendala bahkan cenderung terjadi kompetisi yang dilaluti hipokretisme.

**Kata Kunci:** Islam, Pembauran Sosial, Multikulturalisme

### Latar Belakang

Sebagaimana dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dimana dalam praktek kehidupan sehari-hari sangat dapat dipastikan akan membutuhkan bantuan dari manusia (individu) lain. Hampir tidak bisa ditemukan dimuka bumi ini manusia yang tidak membutuhkan manusia lain, karena memang hal tersebut adalah fitrah manusia yang sengaja di *design* oleh Allah, agar manusia selalu hidup dalam keadaan saling membutuhkan (baca: tolong menolong). Dalam konteks ini, sangat beralasan jika Ibn Khaldun mengatakan bahwa “tidak boleh tidak, manusia sangat perlu bergotong royong dengan sesama. Selama gotong royong itu tidak ada, ia (manusia) akan memperoleh kesulitan. Tetapi jika ia bergotong royong, terpenuhilah hikmat Tuhan agar manusia hidup berkelanjutan dan jenis

bangsa manusia terpelihara<sup>1</sup>.

Untuk dapat melakukan hal tersebut maka manusia harus melakukan pembauran, atau manusia harus melakukan interaksi yang pada akhirnya mengambil bentuk integrasi. Meskipun dalam kacamata sosiolog bahwa interaksi merupakan salah satu dari proses dari integrasi<sup>2</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan pembauran sesuatu yang tertentu hingga

<sup>1</sup> Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 73.

<sup>2</sup> Proses integrasi lainnya adalah identifikasi, kerjasama dan akomodasi. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 53. Sedangkan faktor-faktor yang mewujudkan Integrasi nasional adalah; 1) kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan SARA, 2) kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing dan efek globalisasi dalam berbagai bentuknya, 3) memperteguh sistem budaya yang sesuai dengan ideologi nasional (Pancasila).



menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, kata pembauran, integrasi maupun interaksi tidak dibedakan secara tegas dan akan digunakan secara bergantian.

Integrasi atau pembauran sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Unsur-unsur sosial yang saling berbeda dalam masyarakat itu dapat berupa individu, keluarga, kekerabatan, kelompok sosial, lembaga sosial, status sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Proses penyesuaian yang dimaksud adalah apabila masing-masing unsur yang berbeda tersebut mau mentaati aturan-aturan yang ada dan telah disepakati bersama dan mau memfungsikan dirinya sesuai dengan status dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai agama yang memiliki konsep universal, Islam berpandangan bahwa pembauran merupakan sesuatu yang *inbern* (sifat bawaan) yang ada pada setiap individu manusia, sehingga pada tahapan selanjutnya juga bersemayan pada setiap kelompok manusia yang merupakan kumpulan dari individu-individu itu sendiri.

### Manusia Kolektif

Sekali lagi, bahwa manusia yang dilengkapi Allah dengan sifat bawaan yakni keinginan untuk berinteraksi sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Secara gamblang Marcel A. Boisard menegaskan bahwa Islam berpendirian bahwa bersatunya manusia dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Watak manusia tidak memungkinkan untuk hidup terpencil. Tersusunnya masyarakat sebagai akibat ketidak mampuan ini, keperluan manusia untuk berkelompok itu sesungguhnya berganda. Di satu pihak, keinginan untuk dominasi dan agresi yang merupakan watak bawaan dalam manusia dapat mendorongnya kepada tindakan tanpa pikiran atau merusak. Otoritas dan kekuasaan yang memaksa adalah satu-satunya sarana yang dapat mengatasi rasa dengki, kesombongan, kecurigaan dan keangkuhan pribadi, dan dengan begitu melindungi semua warga kelompok secara timbal balik. Di lain pihak, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memuaskan segala kebutuhannya. Kerjasama dan tolong menolong menjadi keharusan bagi manusia jika ia tidak mau susah. Kehidupan dalam masyarakat memperoleh

kekuatan yang memaksa “diri sendiri” oleh karena dengan hidup dalam masyarakat itu manusia mendapatkan makanan untuk dapat hidup dan senjatanya untuk mempertahankan diri. Dalam pada itu, ia juga mendapat jaminan keamanan dan keuntungan dari tolong menolong sosial itu.<sup>3</sup>

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia adalah kehidupan bersama (kolektif), bukan makhluk yang hidup secara individual. Jika pada suatu masyarakat ditemukan individu yang berperilaku dan sikap secara individualis; menutup diri, tidak bersosialisasi, eksklusif dan lain sebagainya, maka sesungguhnya individu tersebut telah menyalahi fitrah manusia itu sendiri yang pada karakter sesungguhnya adalah hidup secara kolektif. Keharusan untuk hidup secara membaur, dalam tradisi Islam, setidaknya dapat dilihat pada al-Qur'an yang mengeksplorasi secara normatif pola hidup secara integratif, diantaranya terdapat pada surat al Hujurat ayat 13:

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya ialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Spirit yang terkandung pada ayat tersebut secara terang benderang menegaskan bahwa adanya perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan wanita), juga adanya keanekaragaman (pluralitas) suku, bangsa; termasuk juga agama, ras, budaya, bahasa dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan suku maupun perbedaan bangsa, tidak lain adalah *dekrir* atau ketentuan Allah ketika pertamakali menciptakan manusia. Maka menjadi sangat mafhum jika ditegaskan bahwa adanya perbedaan-perbedaan tadi sesungguhnya bukanlah menjadi halangan bagi manusia untuk

<sup>3</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 159.

saling mengenal, berinteraksi, berbuat baik, saling tolong menolong dan seterusnya. Kata “saling mengenal” dalam makna ayat tersebut jika dikaitkan dalam perspektif kajian kali ini, tidak lain adalah pembauran atau integrasi.

Integrasi menuntut adanya kesaling pema-haman dan saling menghargai adanya perbedaan sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi, sebab hanya dengan adanya sikap saling menghargai tersebut, maka integrasi akan dapat dilaksanakan secara *fair*, bertanggung jawab dan bermartabat. Sebaliknya, tanpa mengedepankan sikap penghar-gaan terhadap perbedaan, maka pembauran atau integrasi bisa dipastikan akan banyak mengalami kendala bahkan cenderung terjadi kompetisi yang dibaluti hipokretisme. Jika demikian, maka yang terjadi adalah suatu kepura-puraan bahkan kebo-hongan, sehingga sudah bisa dipastikan tidak akan melahirkan sebuah integrasi yang positif dalam arti yang sesungguhnya. Selain itu, integrasi juga menuntut adanya sikap inklusivistik (keterbukaan) dari masing-masing individu maupun kelom-pok. Sikap inklusif dalam pembauran ini bisa saja mengambil bentuk dimana sebuah kelompok sa-ling menyapa, saling mengunjungi, bahkan saling mempelajari kebiasaan, tradisi, dan lain sebagainya yang dimiliki pada suatu kelompok yang lainnya. Hanya dengan pengembangan sikap inklusivis-tiklah, maka integrasi akan terbangun secara ber-mutu dan berkualitas.

Dalam konteks Indonesia dimana pluralitas sangat nampak dan kentara baik dari aspek etnis, agama, bahasa, budaya dan lain-lain, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Indonesia selain mengapresiasi dan menerima pluralitas tersebut secara positif, aktif dan kreatif sebagai kenyata-an, sehingga bermanfaat bagi manusia itu sendiri.

Secara etimologis, pluralisme (agama) berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “*al-ta’addudiyyah al-diniyyah*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*religious pluralism*”. Oleh karena *pertama*, istilah ini berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. *Pluralism* berarti “jama” atau lebih dari satu. *Kedua*, pengertian filosofis; berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio-politis; adalah suatu sistem yang mengakui ko-eksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menunjukkan

tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karak-teristik diantara kelompok-kelompok tersebut.<sup>4</sup> Ketiga pengertian tersebut dapat disederhanakan dalam suatu pengertian, yaitu ko-eksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing.

Pluralisme juga bermakna keanekaragaman atau kemajemukan (meskipun arti yang satu ini tidak semuanya orang sependapat)<sup>5</sup>. Sesungguhnya paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme pada hakikatnya, tidak hanya cukup dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa ma-syarakat itu majemuk, tetapi yang lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus menerima ke-nyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, dan merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam.

Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fa-natisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engage-ment of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi ke-selamatan umat manusia antara lain melalui me-kanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilinya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Roger Scruton, *A Dictionary of Political Thought*, (London: Macmillan, 1984), h. 215.

<sup>5</sup> Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Diana Eck, seorang tokoh wanita dalam kepenguru-san Dewan Gereja-gereja sedunia di Jenewa Swiss, pengertian pluralisme/pluralitas tidak sama dengan kemajemukan. Pluralisme mengacu pada adanya hubungan saling bergan-tung antar berbagai hal yang berbeda, sedang kemajemukan (*diversitas*) mengacu kepada tidak adanya hubungan seperti itu diantara hal-hal yang berbeda. Lihat Victor I. Tanja, *Plu-ralisme Agama dan Problema Sosial; Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1998), h. 4.

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; Kolom-kolam di Tabloid Tekadi* (Jakarta: Parama-dina, 1999), h. 63. Lihat juga Nurcholish Madjid, “Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional: Antara Konsepsi dan Aktualisasi”, dalam Anshari Thayib dkk. (ed.), *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya : PKSK, 1997), h. 70. Lihat juga Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Mem-*



Merujuk pada penegasan diatas, nampak bahwa di samping pluralisme merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau akan selalu terkait dan bersentuhan dengan berbagai macam sisi kehidupan manusia. Pluralisme agama juga adalah suatu kenyataan hukum alam, dimana manusia sebagai makhluk diciptakan Tuhan dianjurkan untuk selalu melakukan **interaksi** secara positif demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri di muka bumi. Dalam melakukan interaksi tersebut, penganut agama bukan hanya dituntut untuk mengakui adanya eksistensi agama lain, akan tetapi lebih dari itu dimana umat beragama di samping menghargai agama lain (*co-eksistensi*) juga mampu berinteraksi secara positif terhadap umat atau penganut agama yang lain (*pro-eksistensi*).

### Menimbang Multikulturalisme

Kajian tersebut diatas pada konteks kekinian seringkali dijelaskan dengan menggunakan term multikulturalisme. Menurut W. Kymlicka yang dikutip oleh Haryatmoko, multikulturalisme adalah pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar-agar kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan mereka diakui.<sup>7</sup> Adapun tujuan multikulturalisme adalah; *Pertama*, partisipasi aktif sebagai warganegara. Prinsip pemikiran multikultural memperjuangkan agar setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama (hak dan kewajiban) dan atas dasar kemampuan masing-masing ikut serta mengarahkan masa depan masyarakat mereka. *Kedua*, terkait dengan identitas. Multikulturalisme mendorong masyarakat mengakui dan menerima keberagaman budaya sehingga berkembang rasa memiliki dan komitmen kepada masyarakatnya. *Ketiga*, tuntutan keadilan sosial. Dalam kebijakan multikultural, mau dibangun masyarakat yang menjamin perlakuan adil dan hormat akan martabat setiap orang dari mana pun asalnya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu seharusnya menjadi suatu paradigma berpikir bersama bagi suatu masyarakat bahwa dalam pelaksanaan integrasi atau pembauran sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab. Maksudnya adalah pembauran sosial hendaknya

*bangun Sikap Keterbukaan dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. 45.

<sup>7</sup> Lihat Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslibat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 112.

<sup>8</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslibat....*, h... 114.

dijalankan terhadap siapa pun tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dari individu yang lain. Jika pembauran tersebut masih dilakukan dengan cara selektif (melihat perbedaan latar belakang agama, suku, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya), maka sesungguhnya masih menyisakan kesemuan, dan hal tersebut pada gilirannya nanti bisa saja berubah menjadi sebuah pertikaian.

Perilaku saling menghargai dan menghormati dalam pandangan Islam merupakan kebajikan (*virtue*) yang jika dilakukan tentu akan mendapat imbalan pahala (*reward*). Karena itu menurut Boisard, seorang mukmin yang melakukan kewajibannya terhadap anggota yang lain dari masyarakat, baik dalam rangka individual atau kolektif, ia pada waktu yang sama mengikuti hukum yang diwahyukan. Jadi kebajikan (*virtue*) Islam itu bersifat kolektif dan bukan inter-individual.<sup>9</sup>

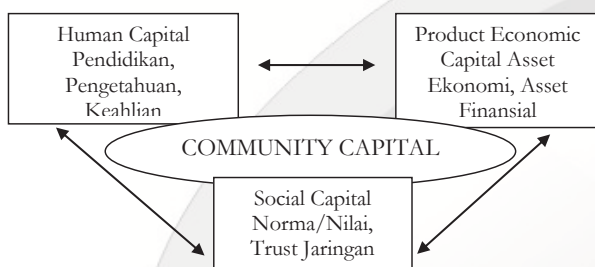
Hal tersebut ditegaskan mengingat pembauran tidak akan banyak mengalami hambatan ketika dilaksanakan pada kelompok yang homogen (utamanya etnis dan agama). Justru yang banyak menimbulkan tantangan (baca: bukan permasalahan) sekaligus peluang adalah, pembauran pada masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi. Akan tetapi, permasalahan dalam pembauran dapat diatasi jika masyarakat dapat saling memahami akan segala macam bentuk perbedaan. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa diantara faktor yang dapat mendorong pembauran sosial adalah adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, adanya perkawinan campur (amalgamasi) dan adanya musuh bersama dari luar. Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas, sesungguhnya terdapat faktor *inner* yang ada pada setiap diri manusia sehingga manusia tersebut memiliki dorongan untuk berbaur.

Terkait dengan pembauran yang dijalankan secara baik, inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai modal sosial yaitu seperangkat nilai atau norma yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka.

Tidak dipungkiri bahwa modal sosial yang dipahami selama ini adalah berupa sesuatu yang bisa ditakar dengan menggunakan standar ekonomi dan nampak secara kasat mata, sedangkan faktor-faktor lain yang dianggap tidak “nampak”,

<sup>9</sup> Boisard, *Humanisme....*, h. 158.

maka seakan-akan menjadi tidak penting dan cenderung diabaikan. Padahal, menurut Hasbullah yang dikutip oleh Syamsul Arifin, bahwa dalam modal sosial terdapat tiga unsur pokok yakni kepercayaan (*trust*), jaringan dan norma. Kepercayaan merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain. Dengan adanya kepercayaan, masyarakat akan mudah merancang suatu jaringan sosial atau prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Unsur berikutnya adalah norma, yakni sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang terlibat dalam jaringan sosial.<sup>10</sup> Setidaknya modal sosial dalam pengertian ini bisa digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa sesungguhnya modal sosial (norma/nilai, kepercayaan dan jaringan sosial) merupakan asset bagi manusia dalam berinteraksi, sebab meskipun dalam ranah modal sosial yang satu ini bisa dikatakan tidak menyumbangkan sesuatu yang jika diukur dengan materi, akan tetapi justru pada level ini modal sosial sebenarnya memiliki kekuatan yang tersembunyi dalam proses keberlangsungan pembauran dan masa depan manusia.

Pada sisi lain, konstruksi multikultural yang menggejala di masyarakat harus diletakkan secara proporsional dalam arti menjadikannya sebagai suatu yang *familiar*, bukan suatu yang asing, sehingga eksistensinya tentu akan di respon dengan baik. Oleh karena itu multikulturalisme adalah suatu fakta yang harus dijaga dan dirawat supaya tidak menjadi suatu yang asing kembali.

Harus diakui bahwa pemahaman tentang hakikat pluralisme maupun multikulturalisme yang kurang memadai menjadi “makhluk” tersebut bukan sebagai faktor integratif, malah sebaliknya dapat menjadi faktor dis-integratif bangsa, sehingga menimbulkan tindakan depersonalisasi dan dehumanisasi. Oleh karena itu, pluralisme dan multikulturalisme harus dipahami secara utuh

<sup>10</sup>Syamsul Arifin, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer* (Malang: UMM Pres, 2009), h. 78.

dan integral. Bahkan sekedar untuk mereshfresh kesadaran dan pemikiran masing-masing individu, menurut penulis diperlukan review terhadap aspek historis perjuangan kemerdekaan bangsa serta perumusan dasar negara yang memiliki motto “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi sangat urgen. Hal ini diperlukan agar terbangun *mind set* saling menghargai perbedaan secara tulus, komunikatif dan terbuka.<sup>11</sup>

Ketika muncul kesepakatan bersama untuk menjadikannya (baca; multikulturalisme) sebagai suatu yang merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat, maka tentu tidak menimbulkan suatu problem yang tiada berkesudahan. Justru multikulturalisme akan melahirkan individu dan kelompok masyarakat yang toleran dan saling menghargai serta hidup dalam keadaan yang damai, rukun dan tolong menolong (*ta’awun*).

Berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa terdapat hubungan antara multikulturalisme dengan modal sosial, dimana multikulturalisme dan modal sosial dapat saling memperkuat. Kesamaan derajat meskipun dalam perbedaan yang sangat ditekankan oleh multikulturalisme akan menjadi kenyataan bila ditopang oleh modal sosial yang menekankan pada kepercayaan, jaringan, dan norma. Jika demikian, maka yang selayaknya dilakukan oleh masyarakat adalah mensinergikan antara multikulturalisme dengan modal sosial sebagai suatu kekuatan dalam yang bersemayan dalam hati dan pemikiran masyarakat.

Satu hal yang perlu ditambahkan bahwa di dalam mensinergikan modal tersebut diatas bahwa hendaknya pembauran sosial selain dilakukan dengan sikap jujur, terbuka (inklusif) adalah pengedepan *moral public* sebagai salah satu wujud dari kriteria masyarakat yang maju dan beradab yakni memiliki moral, etika, akhlak yang terpuji. Hal ini perlu ditekankan mengingat proses timbal balik dalam pembauran sosial kerap kali dinodai oleh praktik-praktik yang tidak bermoral dan terkesan terjadi tindakan depersonalisasi dan dihumanisasi. Karenanya moral menjadi salah unsur penting dalam pelaksanaan pembauran sosial ditengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

### Perlunya Komitmen

Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkoff, syarat terjadinya pembauran sosial adalah:

<sup>11</sup>Idrus Ruslan, “Pluralisme dan Integrasi Bangsa”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Daerah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 27 Oktober 2015



- Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka.
- Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (konsensus) bersama mengenai nilai dan norma.
- Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten.

Pendapat William F. Ogburn dan Meyer Nimkoff tersebut dapat dimaknai bahwa pembauran akan terwujud manakala masyarakat dapat saling mengisi, melengkapi, membantu, menolong (*ta'awun*) diantara mereka, selain itu terdapatnya nilai dan norma sosial yang dibangun, disepakati dan dijalankan secara konsisten dan sinergi. Pendapat ini juga mengingatkan pada sosiolog kenamaan – Talcott Parsons – dengan teori *Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latent pattern-maintenance* (AGIL). *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Adapun *Goal attainment* menunjuk pada pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan itu. Sedangkan *Integration* yaitu koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya menjadi fungsional. Dan *Latent pattern-maintenance* menunjuk gejala bahwa kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma.<sup>12</sup>

Teori *general* yang dikemukakan oleh Parsons tersebut – jika ditarik dalam konteks ke-Indonesiaan – setidaknya mengingatkan kepada rakyat Indonesia akan pentingnya kemampuan beradaptasi, baik terhadap individu/kelompok lain serta beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan dunia yang begitu pesat. Hal ini menjadi penting, sebab manakala sebuah masyarakat melakukan perubahan secara lambat, maka akan menjadi ketinggalan, dan jika hal tersebut terjadi, maka muncullah suatu masyarakat yang selamanya berada “dilandaskan”, sementara masyarakat lain telah meninggalkan landasan tersebut.

Kemudian masyarakat yang *nota bene* adalah hidup dalam suatu bangsa, harus memiliki tujuan bersama. Tujuan bersama ini cukup penting,

<sup>12</sup>Talcott Parsons, “Teori Sistem Umum: Suatu Gerakan ke Arah Kesatuan Teori Ilmu Perilaku”, dalam Margareth M. Poloma (ed), *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 180-181. Penjelasan tentang teori dapat dilihat juga pada George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2012), h. 121.

sebab jika terjadi ketidak sepakatan terhadap sebuah tujuan bersama, maka akan terjadi konflik, pertikaian bahkan pertempuran antar masyarakat dimana hal itu akan sangat merugikan bagi kelanggengan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya tujuan bersama, masyarakat akan memiliki motivasi yang tinggi dan kuat untuk menjadikan hidup secara damai dan harmonis serta menjadikan hidup akan lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan pemahaman itu, jika semangat kebangsaan Indonesia lahir lebih diwarnai oleh kesamaan sejarah masa lalu dan penderitaan bersama yang pernah dirasakan, maka saat ini dan kedepan semangat kebangsaan itu harus dipupuk oleh kesamaan cita-cita tentang negara-bangsa yang ingin kita tuju. Kesana (baca: cita-cita) semua orientasi seluruh komponen masyarakat dengan sekuat tenaga diarahkan .

Aspek lain yang diperlukan adalah integrasi yang dibangun secara bersama-sama dengan kesadaran yang tinggi tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang masing-masing, apalagi bagi masyarakat yang plural. Suatu integrasi yang dibangun bersama-sama tersebut dalam konteks ke-Indonesiaan merupakan sebuah pandangan hidup (*world view*) yang dijadikan rujukan bersama karena nilai-nilainya bersifat mendasar dan universal serta bersifat egaliter atau kesederajatan. Rujukan bersama tersebut tidak lain ialah Pancasila yang oleh para ulama disebut sebagai *mitsâqan ghalidzâ* (kesepakatan luhur). Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup dan kontrak sosial bersama bagi masyarakat Indonesia, karena kehadirannya adalah merupakan titik temu bagi seluruh pandangan masyarakat yang plural.

Lalu yang terakhir adalah kemampun masyarakat memelihara perilaku budaya yang telah tertanam secara berurat dan berakar dalam jiwa sanubari rakyat Indonesia. Perilaku budaya yang dimaksud adalah seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong, toleransi dan saling menghargai serta berkepercayaan terhadap sesuatu yang menguasai alam semesta. Perilaku budaya tersebut tidak boleh bergeser menjadi perilaku budaya yang tidak sesuai apalagi bertentangan dengan perilaku budaya semula. Sebab jika terjadi suatu perubahan dengan perilaku budaya lain yang asing, hal itu berarti di satu sisi, telah menyebabkan teralienasinya perilaku budaya lama yang telah diwariskan secara turun menurun oleh para leluhur bangsa. Sedangkan di sisi lain, sangat boleh jadi perilaku budaya lain yang dianggap baru tersebut tidak sesuai dengan watak

dan karakter rakyat Indonesia bahkan sangat boleh jadi malah bertentangan bertentangan, sehingga mencitrakan manusia yang memiliki watak dan karakter negatif, karena tidak sesuai lagi dengan citra budaya awalnya.

Dalam hal integrasi kebudayaan, maka yang perlu menjadi catatan adalah bukanlah menolak secara membabi buta terhadap kebudayaan lain (asing) atau bahkan melakukan asimilasi yaitu berhadapannya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli. Akan tetapi sejatinya adalah melakukan akulturasi yakni proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing (baru), sehingga kebudayaan asing (baru) diserap/diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa meninggalkan sifat aslinya.

Selain keempat paradigma fungsi yang ditawarkan oleh Parsons tersebut, perlu juga ditambahkan yaitu peran dan fungsi agama. Menurut J.B. Banawiratman, agama selayaknya berfungsi menafsirkan kenyataan hidup dan mengarahkan atau dengan istilah fungsi *interpretatif* dan fungsi *etis*.<sup>13</sup> Dalam perspektif ini, dapat dipahami bahwa agama seharusnya berfungsi sebagai jalan penunjuk bagi manusia yang menjalani kehidupan di dunia dan menjalankan ajaran suatu agama agar tidak “tersesat”. Selain itu agama juga memiliki fungsi bagi manusia untuk menampilkan nilai-nilai etis dalam pergaulan, sehingga dalam pelaksanaan pergaulan antar manusia dilakukan secara bermartabat dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Hal tersebut sangatlah urgen, mengingat beragama atau berkeyakinan dapat dikatakan merupakan kodrat bagi manusia. Dengan menganut agama secara mendalam dan inklusif, maka seorang manusia dapat melihat segala macam perubahan dan kemajuan atau progresivitas yang terjadi di dunia akibat perkembangan pemikiran manusia secara jernih sekaligus, dan dapat membentengi diri dari terjangan budaya asing juga “imbis modernitas” yang banyak diantaranya tidak sesuai dengan karakter dan budaya asli Indonesia.

Dalam perspektif sosiologis, pemetaan yang digunakan oleh Parsons diatas disebut dengan pendekatan fungsionalisme struktural, yang menurut Nasikun dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar, yaitu :

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
3. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah ekuilibrium yang bersifat dinamis menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
4. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi.
5. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian, dan tidak secara revolusioner.
6. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan; penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar; pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
7. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.<sup>14</sup>

Maksud penulis mengemukakan analisis yang dikemukakan oleh Nasikun terhadap pendapat Parsons tersebut ialah ingin menunjukkan bahwa suatu sistem atau nilai sosial tidak lain adalah suatu sistem dari pada tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi pada berbagai individu, yang tumbuh dan

<sup>13</sup>J.B. Banawiratma dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 182.

<sup>14</sup>Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13-15.



berkembang bukan secara kebetulan, tetapi atas dasar standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Hal ini bermakna bahwa sistem nilai atau budaya yang ada pada suatu bangsa merupakan kesepakatan dari masyarakatnya dan dalam konteks Indonesia masih sangat mengedepankan aspek moral dan aspek religius secara bersamaan.

Dalam masyarakat menurut Boisard diperlukan konsensus yang disetujui secara timbal balik sebagai “kontrak sosial” yang akan menjelaskan kewajiban-kewajiban dan menjamin hak masing-masing. Konsensus atau persetujuan antara kemauan-kemauan tersebut harus bersandar kepada suatu norma yang lebih tinggi yaitu agama atau Tuhan.<sup>15</sup> Dengan begitu, maka nilai-nilai yang tidak senafas dengan aspek moral dan religius atau dengan bahasa lain nilai-nilai sekuler, bisa dipastikan tidak akan di terima dalam ranah “nalar publik” masyarakat Indonesia.

Beberapa catatan diatas seharusnya dijadikan kesepakatan atau konsensus yang pelaksanaannya perlu dilakukan secara konsisten dan komitmen. Sebab sebaik apa pun nilai, norma, konsensus yang telah dibangun, namun pelakunya tidak memiliki kesadaran dan komitmen untuk melaksanakannya, maka hal tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna.

### Islam dan Pembauran: Hubungan Timbal Balik

Menyandingkan atau bahkan mengkomparasikan Islam dengan pembauran, tentulah tidak tepat, karena Islam adalah sebuah agama dimana norma dan nilai-nilai yang dikandungnya diturunkan oleh Allah penguasa alam beserta isinya (*the ultimate reality*). Sedangkan pembauran adalah perilaku yang dibangun oleh umat atau masyarakat yang *nota bene* merupakan penganut dari suatu agama (Islam) dalam rangka melanggengkan kehidupan mereka (*survive*). Penyandingan Islam dan pembauran dalam konteks ini adalah dalam rangka menyelaraskan hubungan keduanya sebagai suatu yang *mutual symbiosis* bukan suatu yang berlawanan.

Disatu sisi, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam bisa dipastikan sangat menganjurkan kepada penganutnya untuk melakukan pembauran yang tentu saja dilakukan dengan cara-cara yang adil, jujur dan inklusif. Artinya melakukan pembauran yang diiringi sifat toleran, saling menghargai dan menghormati, terbuka baik dalam tataran

internal umat Islam, apalagi terhadap pihak eksternal Islam. Pembauran – terutama antar umat beragama – seyogyanya dapat diikat dan diarahkan kepada hal-hal yang positif seperti dalam gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan pembebasan dari penderitaan. Gerakan-gerakan tersebut menjadi tugas kemanusiaan yang berdimensi *perennial* dan *prophetic*. Di samping itu bentuk-bentuk pembauran yang negatif tentu saja tidak dibahas secara detail, karena memang bukan disitu fokus kajiannya, meskipun berbagai macam perilaku yang mengindikasikan sebagai pembauran negatif tidaklah sulit untuk diinventarisir seperti pembauran yang merendahkan bahkan mengabaikan hak-hak orang lain, egoisme, temperamental, eksklusifistik, dan lain sebagainya.

Sedangkan disisi lain, pembauran yang positif – selain memiliki landasan normatif – merupakan kebutuhan alami manusia yang tidak mungkin diingkari. Mengingkari kebutuhan alami tersebut sama artinya dengan melakukan gerakan *mission impossible*, yang tidak mungkin untuk dilakukan karena bertentangan kodrat manusia itu sendiri. Perspektif ini menandakan bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melakukan pembauran sehingga manusia (masyarakat) dapat menopang keberlangsungannya. Tanpa bantuan manusia yang lain, maka seorang manusia bisa dipastikan tidak akan ada lagi di muka bumi.

Dalam agama Islam terdapat anjuran untuk hidup secara bersosialisasi. Kata *li ta'arafu* dalam Surat al-Hujurat 13 sebagaimana yang telah dieksplorasi dibagian awal tulisan ini, bermakna keharusan bagi manusia untuk bersosialisasi atau melakukan pembauran. Namun demikian, makna lain yang terkandung dari penegasan ayat tersebut adalah adanya fakta keberanekaragaman (multi-kulturalisme) yang tidak lain kecuali atas kehendak Allah. Oleh karena itu, manusia tidak bisa mengingkari adanya keanekaragaman tersebut, sehingga yang paling tepat untuk dilakukan oleh umat manusia (masyarakat) adalah merespon fakta tersebut secara arif dan bijak. Justru dengan adanya keanekaragaman tersebut manusia dituntut untuk saling berlomba-lomba dalam hal prestasi positif yang dimiliki masing-masing. Sebab dalam pandangan Allah, bahwa yang paling baik diantara manusia adalah yang memiliki prestasi positif, namun tidak mengingkari eksistensi-Nya.

Pembauran dalam perspektif Islam sangatlah urgen, sebab pembauran dapat dijadikan

<sup>15</sup>Boisard, *Humanisme.....*, h. 160.



sebagai lahan bagi manusia Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta sebagai lahan bagi manusia tersebut untuk meningkatkan pundi-pundi amal baiknya. Hal ini bisa dimaknai bahwa ketika seorang individu memiliki harta yang banyak, masiakah ia memiliki *responsibility* yang banyak pula terhadap individu lain; yang – sebut saja – hidup dalam keadaan serba kekurangan, atautkah justru sebaliknya, seorang yang banyak harta tersebut menunjukkan sikap tidak peduli serta acuh terhadap fenomena tersebut. Apalagi saat ini manusia hidup dizaman modern yang dengan kemodernan tersebut semua sisi kehidupan berjalan dengan serba cepat. Kecanggihan teknologi, seringkali membuat manusia bersikap seakan-akan tidak lagi perlu dan butuh dengan bantuan orang lain, sebab segala kebutuhan hidupnya bisa saja ia penuhi cukup dengan menggunakan kecanggihan teknologi tersebut dari ruangan kamar pribadinya saja.

Saat ini manusia hidup di era yang modern dan global, dimana seseorang dibelahan bumi dapat menyaksikan kejadian secara langsung yang terjadi dibelahan bumi lainnya; seperti pertandingan sepak bola di Inggris, Spanyol, Italia dan lain-lain bisa disaksikan secara bersamaan di Indonesia. Begitu juga dengan daerah konflik atau peperangan yang terjadi di Syria atau negara-negara lain pun bisa di ketahui saat kejadian tersebut. Hal itu semua merupakan akibat kemajuan dan kecanggihan teknologi, serta masih banyak contoh lain yang dapat dimanfaatkan akibat kemajuan teknologi. Akan tetapi menurut penulis, hal tersebut bukanlah berarti bahwa manusia dapat hidup sendiri atau menyendiri tanpa melakukan pembauran dengan manusia lain. Sesungguhnya manusia tidak mungkin bisa lepas dari bantuan orang lain, karena memang tidak ada manusia dimuka bumi yang dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan individu lain. Oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana menjadi sosok individu yang dapat mengambil manfaat dari kemajuan teknologi (informasi dan telekomunikasi), namun tetap menunaikan kewajibannya sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk yang agamis.

### Kesimpulan

Dalam perspektif Islam, setiap diri individu dan atau masyarakat memiliki sifat bawaan yakni untuk melakukan pembauran yang merupakan *design* Allah. Pembauran bisa mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif-konstruktif manakala

dilakukan dengan cara-cara yang baik, jujur dan inklusif; toleran, saling menghargai, tidak membedakan latar belakang (ras, etnis, budaya, agama dan lain-lain). Sebaliknya, pembauran juga dapat mengarah kepada bentuk negatif-destruktif, jika dilakukan dengan cara yang kaku dan eksklusif; egoisme, menganggap rendah orang lain, tidak toleran, pilih kasih dan lain-lain. Karenanya, dalam pembauran diperlukan sebuah konsensus yang dimanifestasikan secara konsisten oleh manusia. Tanpa adanya kesadaran dan komitmen untuk melaksanakannya, maka segalanya akan menjadikan kehidupan manusia itu sendiri porak poranda.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa keduanya memiliki keterkaitan; dimana Islam memerintahkan untuk melakukan pembauran dengan cara-cara yang positif-konstruktif, sedangkan pembauran itu sendiri amatlah diperlukan manusia agar mereka tetap eksis dan *survive* dalam melakoni hidup dan mengemban amanah baik sebagai *'abd Allah* maupun sebagai *khalifat Allah fi al-Ardh*.

### Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer* (Malang: UMM Press. 2009)
- Banawiratma, J.B., *Atas Nama Agama* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
- Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslibat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia, 2010)
- Khalidun, Ibn, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)
- Madjid, Nurcholish, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; Kolom-kolam di Tabloid Tekad* (Jakarta : Paramadina, 1999)
- , "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional : Antara Konsepsi dan Aktualisasi", dalam Anshari Thayib dkk. (ed.), *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya : PKSK, 1997)
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Poloma, Margareth M. (ed), *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2012)
- Ruslan, Idrus, “Pluralisme dan Integrasi Bangsa”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Daerah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 27 Oktober 2015.
- Scruton, Roger, *A Dictionary of Political Thought* (London: Macmillan, 1984)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Tanja, Victor I., *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1998)

